

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YIAH  
PROPINSI SERTA PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA/  
MAHKAMAH SYAR'YIAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : bahwa berhubung dengan meningkatnya beban kerja dan luasnya wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang dan Banjarmasin serta sesuai dengan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/132/N/1981 tanggal 17 September 1981 dipandang perlu membentuk 5 (lima) Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi serta 2 (dua) Pengadilan Agama dan 32 (tiga puluh dua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970;  
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977;  
4. Staatsblad 1882 Nomor 152 jo Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 jis Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 (Republik Indonesia Negara Bagian) dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;  
6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;  
7. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1982;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981.

**Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-978/1/MENPAN/10/82 tanggal 25 Oktober 1982.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : a. Membentuk Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Manado, Ambon, Mataram dan Jayapura sebagai pelaksanaan tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang pada Propinsi yang bersangkutan;  
b. Membentuk Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

	Propinsi di Pontianak sebagai pelaksana tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banjarmasin pada Propinsi Kalimantan Barat.	TEN
Kedua	: Membentuk 2 (dua) Pengadilan Agama dan 32 (tiga puluh dua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.	1.
Ketiga	: a. Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukumnya masing-masing.	2.
	b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut pada diktum kedua mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari wilayah hukumnya masing-masing.	3.
Keempat	: Pada masing-masing Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi ditugaskan seorang Hakim senior Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi selaku Ketua Cabang dan sekurang-kurangnya dua Hakim Anggota.	4.
Kelima	: a. Ketua Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Menado, Ambon, Mataram, dan Jayapura masing-masing bertanggung jawab kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang;	5.
	b. Ketua Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Pontianak bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banjarmasin.	6.
Keenam	: a. Formasi pegawai dan anggaran Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Menado, Ambon, Mataram, dan Jayapura merupakan bagian dari formasi pegawai dan anggaran Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang;	7.
	b. Formasi pegawai dan anggaran Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Pontianak merupakan bagian dari formasi pegawai dan anggaran Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banjarmasin.	8.
Ketujuh	: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;	9.
Kedelapan	: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.	10.
Kesembilan	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	11.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 1982

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

II. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Presiden R.I.
2. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.;
3. Badan Pengawas Keuangan (BAPEKA/BPK) di Jakarta;
4. MENKO KESRA;
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan III;
6. Pangkopkamtib, Jaksa Agung, Kapolri, Ka BAKIN;
7. Kepala Bappenas/BAKN/LIPI/IAN;
8. Sekretariat Negara;
9. Sekretariat Kabinet Pembangunan III;
10. Sekjen DRP-RI;
11. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
12. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
13. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan;
14. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
15. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabadiitbang Agama/Staf Ahli Menteri Departemen Agama;
16. Gubernur KDH TK. I di seluruh Indonesia;
17. Rektor IAIN di seluruh Indonesia;
18. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ka Puslitbang Agama/Ka Pusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama;
19. Direktur Pembinaan Anggaran Pembangunan pada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
20. Direktur Pembinaan Anggaran Rutin pada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
21. Direktur Tata Usaha Keuangan Negara pada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
22. Direktur Pengawasan Anggaran pada Ditjen Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan;
23. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia;
24. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi di seluruh Indonesia;
25. Bupati KDH TK. II/Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
26. Kepala Kandepag Kodya/Kabupaten di seluruh Indonesia;
27. KPN di seluruh Indonesia;
28. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
29. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta (MUI).

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
 NOMOR : 95  
 TAHUN : 1982  
 TANGGAL : 28 Oktober 1982

DAFTAR PENGADILAN AGAMA  
 DAN PENGADILAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YIAH

Nomor	Propinsi	Nama Pengadilan Agama
1	2	3
1.	Jawa Barat	Pengadilan Agama Subang
2.	Jawa Tengah	Pengadilan Agama Ambarawa
3.	D.I. Aceh	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Jantioi
4.	Sumatera Barat	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lubuk Basung
5.	Riau	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dumai
6.	Sumatera Selatan	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sekayu
7.	Lampung	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kalianda
8.	Kalimantan Barat	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Mempawah
9.	Kalimantan Timur	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tarakan
10.	Sulawesi Utara	1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tondano 2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Limboto
11.	Bali	1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bangli 2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Negara 3. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Karang Asem 4. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tabanan 5. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Klungkung 6. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Gianjar
12.	Nusa Tenggara Timur	1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Larantuka 2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ruteng 3. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Atambua 4. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Soe 5. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kefamananu 6. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bajawa 7. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Meumere

13. Irian Jaya
1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Jayapura
  2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sorong
  3. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Biak
  4. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Fak-Fak
  5. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Manokwari
  6. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nabire
  7. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Wamena
  8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Merauke
  9. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Serui
14. Timor Timur
- Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dilli
- 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA.